

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pendidikan Politik

1. Pengertian Pendidikan Politik

Istilah pendidikan politik dalam Bahasa Inggris sering disamakan dengan istilah *political socialization*. Istilah *political socialization* jika diartikan secara harfiah ke dalam bahasa Indonesia akan bermakna sosialisasi politik. Oleh karena itu, dengan menggunakan istilah *political socialization* banyak yang mensinonimkan istilah pendidikan politik dengan istilah Sosialisasi Politik, karena keduanya memiliki makna yang hampir sama. Dengan kata lain, sosialisasi politik adalah pendidikan politik dalam arti sempit.

Menurut Ramlan Surbakti dalam memberikan pengertian tentang pendidikan politik harus dijelaskan terlebih dahulu mengenai sosialisasi politik. Surbakti (1999:117) berpendapat bahwa :

Sosialisasi politik dibagi dua yaitu pendidikan politik dan indoktrinasi politik. Pendidikan politik merupakan suatu proses dialogik diantara pemberi dan penerima pesan. Melalui proses ini, para anggota masyarakat mengenal dan mempelajari nilai-nilai, norma-norma, dan simbol-simbol politik negaranya dari berbagai pihak dalam sistem politik seperti sekolah, pemerintah, dan partai politik.

Pendapat di atas menyatakan bahwa pendidikan politik merupakan bagian dari sosialisasi politik. Pendidikan politik mengajarkan masyarakat untuk lebih mengenal sistem politik negaranya. Dapat dikatakan bahwa sosialisasi politik adalah proses pembentukan sikap dan orientasi politik para anggota masyarakat. Melalui proses sosialisasi politik inilah para anggota masyarakat memperoleh sikap dan orientasi terhadap kehidupan politik yang berlangsung dalam masyarakat.

Merujuk pada pengertian pendidikan politik, Rush dan Althoff (2005:18) menganggap bahwa sosialisasi politik ialah sebagai suatu proses, oleh pengaruh mana seorang individu bisa mengenali sistem politik, yang kemudian menentukan sifat persepsi-persepsinya mengenai politik serta reaksi-reaksinya terhadap gejala-gejala politik. Sosialisasi politik tergantung dari lingkungan tempat individu tinggal maupun kepribadian dari individu tersebut seperti yang diungkapkan oleh Rush dan Althoff (2005:27) yaitu sosialisasi politik ditentukan oleh lingkungan sosial, ekonomi, dan kebudayaan dimana individu-individu berada; selain itu juga ditentukan oleh interaksi pengalaman-pengalaman serta kepribadiannya.

Sosialisasi politik sebagai suatu proses belajar tentang politik. Berkaitan dengan pendapat-pendapat tersebut, persoalan pokok sosialisasi politik adalah bagaimana seseorang menjadi paham akan politik. Dalam proses belajar politik (*political learning*) terdapat

sumber atau agen atau saran-sarana sosialisasi politik. Almond (1990) yang dikutip oleh Hartono menyebutkan adanya beberapa agen sosialisasi politik, seperti keluarga, sekolah, Kelompok bergaul atau bermain (*peer group*), pekerjaan, media massa, dan kontak politik langsung. Pentingnya agen-agen atau sarana-sarana sosialisasi sosialisasi politik, sangat bergantung pada intensitas interaksi individu dengan agen-agen atau sarana-sarana, proses komunikasi, penekunan, dan usia seseorang.

Menurut Supriadi (1999:70) Karena kata pendidikan politik dan kata sosialisasi politik memiliki arti yang berdekatan atau hampir sama maka dapat digunakan secara bergantian. Alfian (1981:235) juga menganggap bahwa adanya keertan hubungan antara pendidikan politik dan sosialisasi politik sehingga ia mengatakan bahwa: "Adapun sosialisasi politik ini dapat dianggap sebagai pendidikan politik dalam arti yang longgar".

Mengenai pengertian dari pendidikan politik (dalam arti kata yang lebih ketat) Alfian (1981:235) mengatakan : "dapat diartikan sebagai usaha yang sadar untuk megubah proses sosialisasi politik masyarakat sehingga mereka memahami dan menghayati betul nilai-nilai yang terkandung dalam sistem politik yang ideal yang hendak di bangun". Hal serupa juga dinyatakan oleh Kartini Kartono (1996:64) bahwa :

"Pendidikan politik merupakan upaya pendidikan yang disengaja dan sistematis untuk membentuk individu agar

mampu menjadi partisipan yang bertanggung jawab secara etis/moral dalam mencapai tujuan- tujuan politik”.

Dari dua definisi yang tertera diatas, dapat kita ambil dua tujuan utama yang dimiliki oleh pendidikan politik. Pertama, dengan adanya pendidikan politik diharapkan setiap individu dapat mengenal dan memahami nilai-nilai ideal yang terkandung dalam sistem politik yang sedang diterapkan. Kedua, bahwa dengan adanya pendidikan politik setiap individu tidak hanya sekedar tahu saja tapi juga lebih jauh dapat menjadi seorang warga Negara yang memiliki kesadaran politik untuk mampu mengemban tanggung jawab yang ditunjukan dengan adanya perubahan sikap dan peningkatan kadar partisipasi dalam dunia politik.

Rusadi Kartaprawira (1988:54) memandang bahwa pendidikan politik yaitu sebagai upaya meningkatkan pengetahuan politik rakyat dan agar mereka dapat berpartisipasi secara maksimal dalam sistem politiknya, sesuai dengan paham kedaulatan rakyat atau demokrasi bahwa rakyat harus mampu menjalankan tugas partisipasi.

Dalam kaitan pendidikan politik ini, A. Kosasih Djahiri (1996 :18) menyatakan bahwa:

Pendidikan politik adalah pendidikan atau bimbingan, pembinaan warga Negara suatu Negara untuk memahami mencintai dan memiliki rasa keterikatan diri (*sense of belonging*) yang tinggi terhadap bangsa Negara dan seluruh perangkat sistem maupun kelembagaan yang ada.

Dengan demikian pendidikan politik berupaya merubah warga

Negara agar dapat memiliki kesadaran politik. Memiliki kesadaran politik berarti memiliki keterpaduan aspek kognitif, afektif dan psikomotor dari individu dalam berpolitik.

Dihubungkan dengan tujuan pendidikan politik untuk menciptakan warga Negara yang memiliki kesadaran politik sehingga terjadi pembaharuan kehidupan politik dalam rangka menciptakan suatu sistem politik yang demokratis, Affandi (1996:26) melihat sosialisasi politik dalam tiga perspektif, Yakni perspektif konsensus, perspektif konstruksi sosial tentang realitas dan perspektif humanisme.

Merujuk pada semua pengertian pendidikan politik yang disampaikan oleh beberapa ahli diatas, pada akhirnya telah membawa penulis sampai pada kesimpulan yang menyeluruh. Bahwa yang dimaksud dengan pendidikan politik adalah suatu upaya sadar yang dilakukan antara pemerintah dan para anggota masyarakat secara terencana, sistematis, dan dialogis dalam rangka untuk mempelajari dan menurunkan berbagai konsep, simbol, nilai-nilai, dan norma norma politik dari satu generasi ke generasi selanjutnya.

2. Fungsi Pendidikan Politik

Sesuai dengan pengertian pendidikan politik itu sendiri maka pendidikan politik mempunyai dua fungsi utama yaitu pertama dalam merubah atau membentuk tata laku pribadi atau individu dan yang kedua lebih luas lagi yaitu membentuk suatu tatanan masyarakat

yang diinginkan sesuai dengan tuntutan politik. Menurut Kartini Kartono (1996: 57) bahwa pendidikan politik dapat memberikan sumbangan besar bagi :

- a. Proses demokrasi yang semakin maju dari semua individu (rakyat) dan masyarakat/struktur kemasyarakatannya,
- b. Dengan prinsip-prinsip realistik, lebih manusiawi, dan berlandaskan hukum formal dalam menggalang komunikasi politik yang modern.

Fungsi pendidikan diatas lebih menekankan fungsinya dalam merubah tatanan masyarakat agar lebih baik dari sebelumnya yang ditandai dengan adanya perubahan sikap dari individu-individu dalam masyarakat tersebut, yang lebih mendukung proses demokrasi. Sedangkan fungsi pendidikan bagi individu sendiri, menurut Kartini Kartono (1996: 59) ialah:

- a. Peningkatan kemampuan individual supaya setiap orang mampu berpacu dalam lalu lintas kemasyarakatan yang menjadi semakin padat penuh-sesak dan terpolusi oleh dampak bermacam-macam penyakit sosial dan kedurjanaan.
- b. Di samping mengenai kekuasaan, memahami mekanismenya, ikut mengendalikan dan mengontrol pelaksanaan kekuasaan di tengah masyarakat.

Fungsi pendidikan politik bagi individu yang tertera di atas tidak hanya mengubah individu tapi juga membentuk individu yang baru. Dalam artian bahwa seorang individu dengan melalui pendidikan politik tidak hanya memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang politik tapi juga mempunyai kesadaran dan sensitifitas dalam berpolitik yang direalisasikan dalam bentuk perbuatan yaitu dengan ikut berpartisipasi atau ditunjukkan dengan sikap dan perilaku politik

yang lebih luas dalam usahanya untuk mencapai tujuan politik.

Rusadi Kantaprawira (1988: 54) memandang pendidikan politik sebagai salah satu fungsi struktur politik dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan politik rakyat dan agar mereka dapat berpartisipasi secara maksimal dalam sistem politiknya. Dalam kaitan itu Idrus Affandi (1996:27) mengatakan bahwa pendidikan politik merupakan metode untuk melibatkan rakyat dalam sistem politik melalui partisipasinya dalam menyalurkan tuntutan dan dukungan.

3. Tujuan Pendidikan politik

Tujuan pendidikan politik adalah memberikan pedoman kepada generasi muda Indonesia guna meningkatkan kesadaran kehidupan berbangsa dan bernegara. Sedangkan tujuan pendidikan politik ialah menciptakan generasi muda Indonesia yang sadar akan kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 sebagai salah satu usaha untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya.

Berdasarkan pemaparan tentang tujuan pendidikan politik diatas, penulis berpendapat bahwa yang menjadi tujuan utama dari pendidikan politik adalah agar generasi muda saat ini memiliki kemampuan untuk memahami situasi sosial politik penuh konflik. Aktivitas yang dilakukan pun di arahkan pada proses demokratisasi serta berani bersikap kritis terhadap kondisi masyarakat di lingkungannya. Pendidikan politik mengajarkan mereka untuk mampu

mengembangkan semua bakat dan kemampuannya (aspek kognitif, wawasan, kritis, sikap positif, dan keterampilan politik). Kesemua itu dirancang agar mereka dapat mengaktualisasikan diri dengan jalan ikut berpartisipasi secara aktif dalam bidang politik.

Adapun tujuan dari pendidikan politik Nazsir dan Amril (2004:104) yaitu:

1. Melatih orang muda dan orang dewasa menjadi warga Negara yang baik; khususnya dalam fungsi sosial dan fungsi politik, seperti bisa mengembangkan sikap gotong royong/kooperatif, mau bermusyawarah dan kerja sama; bersikap toleran, solider, loyal terhadap bangsa dan Negara, bersikap sportif dan seterusnya demi kesejahteraan hidup bersama.
2. Membangkitkan dan mengembangkan hati nurani politik, rasa etika politik dan tanggung jawab politik, agar orang menjadi insan politik terpuji (bukan memupuk egoisme dan menjadi bintang politik).
3. Agar orang memiliki wawasan kritis mengenai relasi-relasi politik yang ada di sekitarnya. Memiliki kesadaran bahwa urusan-urusan manusia dan struktur sosial yang ada di tengah masyarakat itu tidak permanen, tidak massif atau immanen sifatnya, tetapi selalu bisa berubah dan dapat diubah melalui perjuangan politik.
4. Kemudian mampu mengadakan analisis mengenai konflik-konflik politik yang aktual, lalu berusaha ikut memecahkan; jadi terdapat partisipasi politik. Sebab, urusan politik itu jelas membawa dampak kebaikan atau keburukan kepada rakyat banyak. Karena rakyat juga sangat berkepentingan dengan urusan politik yang menyangkut mati hidupnya diri sendiri dan keselamatan rakyat pada umumnya.
5. Selanjutnya berpartisipasi politik dengan jalan memberikan pertimbangan yang konstruktif mengenai masyarakat dan kejadian politik itu merupakan hak-hak demokratis yang asasi. Hal yang perlu bukan hanya melancarkan proses-proses politik dari warga Negara dan pertanggungjawabannya untuk mengatur masyarakat dan negara mengarah pada kehidupan yang sejahtera.

Sedangkan Kartini Kartono (1996:68) menjelaskan bahwa tujuan pendidikan politik ialah:

1) Membuat rakyat (individu, kelompok, klien, anak didik, warga masyarakat, rakyat, dan seterusnya) :

- Mampu memahami situasi sosial politik penuh konflik.
- Berani bersikap tegas memberikan kritik membangun terhadap kondisi masyarakat yang tidak mantap.
- Aktivasnya diarahkan pada proses demokratisasi individu atau perorangan, dan demokratisasi semua lembaga kemasyarakatan serta lembaga Negara.
- Sanggup memperjuangkan kepentingan dan ideologi tertentu, khususnya yang berkolerasi dengan keamanan dan kesejahteraan hidup bersama.

2) Memperhatikan dan mengupayakan :

- Peranan insani dari setiap individu sebagai warga Negara (melaksanakan realisasi diri/ aktualisasi diri dari dimensi sosialnya)
- Mengembangkan semua bakat dan kemampuannya (aspek kognitif, wawasan, kritis, sikap positif, keterampilan politik)
- Agar orang bisa aktif berpartisipasi dalam proses politik, demi pembangunan diri, masyarakat sekitar, bangsa dan Negara.

Antara fungsi pendidikan politik dan tujuan dari pendidikan politik mempunyai kedekatan tersendiri yang tak dapat dipisahkan dan keberhasilan pencapaian fungsi dan tujuan dari pendidikan politik merupakan keberhasilan dari pelaksanaan pendidikan politik itu sendiri. Menurut Alfian (1990:236) untuk menganalisis keberhasilan pendidikan politik dilihat dari dua dimensi, dimensi pertama berupa gambaran jelas tentang sistem politik ideal yang diinginkan, dimensi kedua ialah realitas atau keadaan sebenarnya dari masyarakat itu sendiri yang langsung diperbandingkan dengan tuntutan-tuntutan sistem politik tadi.

Dihubungkan dengan dimensi yang kedua dalam melakukan

analisis keberhasilan pendidikan politik yang pada intinya melakukan kaji banding antara tuntutan sistem politik ideal dengan realitas politik yang sesungguhnya menurut Idrus Affandi (1996:28) mutlak diperlukan adanya struktur baku sistem politik yang dicita-citakan, yakni sistem politik yang mencerminkan nilai dan norma yang merupakan landasan dan motivasi masyarakat sekaligus dasar untuk membina dan mengembangkan diri untuk melibatkan di dalamnya.

4. Bentuk Pendidikan Politik

Pendidikan politik tidak akan terlaksana tanpa adanya penyelenggaraan yang dilakukan secara nyata di lapangan atau di tengah-tengah masyarakat. Sedangkan penyelenggaraan pendidikan politik tentunya akan berkaitan erat dengan bentuk pendidikan politik yang akan diterapkan di tengah-tengah masyarakat tersebut. Dengan demikian, bentuk pendidikan politik mana yang akan diterapkan dalam mendukung terlaksananya pendidikan politik merupakan hal yang sangat penting bagi pemerintahan suatu Negara, pada umumnya pemerintah memegang peranan yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan di dalam sebuah Negara.

Bentuk pendidikan politik menurut Rusadi Kantaprawira (2004: 56) dapat diselenggarakan antara lain melalui:

- a. Bahan bacaan seperti surat kabar, majalah, dan lain-lain bentuk publikasi massa yang biasa membentuk pendapat umum.
- b. Siaran radio dan televisi serta film (audio visual media)

- c. Lembaga atau asosiasi dalam masyarakat seperti masjid atau gereja tempat menyampaikan khotbah, dan juga lembaga pendidikan formal (sekolah) ataupun informal.

Berdasarkan pendapat diatas, dapat kita lihat bahwa pendidikan politik dapat diberikan melalui berbagai jalur. Pemberian pendidikan politik tidak hanya dibatasi oleh lembaga seperti persekolahan atau organisasi saja. Namun dapat diberikan melalui media, misalnya media cetak dalam bentuk artikel.

Apabila dihubungkan dengan macam bentuk pendidikan politik di atas, bentuk pendidikan politik yang diemban media massa dalam hal ini, yaitu surat kabar dan partai politik ialah bukan merupakan bentuk pendidikan politik formal. Semua bentuk pendidikan politik sebenarnya tidak jadi persoalan, artinya semuanya baik asalkan mampu memobilisasi simbol-simbol nasional sehingga pendidikan politik tersebut dapat merubah individu yang memiliki kecintaan terhadap bangsanya atau memiliki rasa keterikatan diri (*sense of belonging*) yang tinggi terhadap bangsa Negara.

Apabila diasosiasikan dengan bentuk politik yang tertera diatas, maka menurut penulis yang menjadi tolak ukur utama keberhasilan pendidikan politik terletak pada penyelenggaraan bentuk pendidikan politik yang melalui jalur lembaga atau asosiasi dalam masyarakat. Dalam hal ini penulis sangat sependapat bila pendidikan politik lebih ditekankan melalui jalur pendidikan formal. pendidikan

politik formal yaitu pendidikan politik yang diselenggarakan melalui lembaga resmi (sekolah).

B. Hubungan Pendidikan Politik dan Pendidikan Kewarganegaraan

Antara pendidikan politik dengan pendidikan kewarganegaraan mempunyai hubungan yang tidak bisa dipisahkan, Pendidikan Kewarganegaraan sebagai mata pelajaran yang didalamnya banyak memberikan materi tentang politik, demokrasi, budaya, nilai, tujuan pendidikan ini adalah untuk membangun kesadaran peserta didik akan hak dan kewajibannya sebagai warga Negara.

Pendidikan Kewarganegaraan menurut Depdiknas (2006:49), adalah mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga Negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945. Lebih lanjut Somantri (2001:154) mengemukakan bahwa:

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan usaha untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan dan kemampuan dasar yang berkenaan dengan hubungan antar warga Negara dengan Negara serta pendidikan pendahuluan bela Negara agar menjadi warga Negara agar dapat diandalkan oleh bangsa dan Negara.

Menurut Branson (1999:4) *Civic Education* dalam demokrasi adalah pendidikan – untuk mengembangkan dan memperkuat – dalam atau tentang pemerintahan otonom (*self government*). Pemerintahan otonom demokratis berarti bahwa warga Negara aktif terlibat dalam

pemerintahannya sendiri mereka tidak hanya menerima didikte orang lain atau memenuhi tuntutan orang lain.

Beberapa unsur yang terkait dengan pengembangan Pendidikan Kewarganegaraan, antara lain Somantri, (2001:158):

- a. Hubungan pengetahuan intraseptif (*intraseptive knowledge*) dengan pengetahuan ekstraseptif (*extraseptive knowledge*) atau antara agama dan ilmu.
- b. Kebudayaan Indonesia dan tujuan pendidikan nasional.
- c. Disiplin ilmu pendidikan, terutama psikologi pendidikan.
- d. Disiplin ilmu-ilmu sosial, khususnya “ide fundamental” Ilmu Kewarganegaraan.
- e. Dokumen Negara, khususnya Pancasila, UUD 1945 dan perundangan Negara serta sejarah perjuangan bangsa.
- f. Kegiatan dasar manusia.
- g. Pengertian pendidikan IPS

Ketujuh unsur inilah yang akan mempengaruhi pengembangan Pendidikan Kewarganegaraan. Karena pengembangan Pendidikan Kewarganegaraan akan mempengaruhi pengertian Pendidikan Kewarganegaraan sebagai salah satu tujuan pendidikan IPS.

Sehubungan dengan itu, Pendidikan Kewarganegaraan sebagai salah satu tujuan pendidikan IPS yang menekankan pada nilai-nilai untuk menumbuhkan warga Negara yang baik dan patriotik, maka batasan pengertian Pendidikan Kewarganegaraan dapat dirumuskan sebagai berikut (Somantri, 2001:159):

Pendidikan Kewarganegaraan adalah seleksi dan adaptasi dari disiplin ilmu-ilmu sosial, ilmu kewarganegaraan, humaniora, dan kegiatan dasar manusia, yang diorganisasikan dan disajikan secara psikologis dan ilmiah untuk ikut mencapai salah satu tujuan pendidikan IPS.

Beberapa faktor yang lebih menjelaskan mengenai Pendidikan Kewarganegaraan antara lain (Somantri, 2001:161):

- a. Pendidikan Kewarganegaraan merupakan bagian atau salah satu tujuan pendidikan IPS, yaitu bahan pendidikannya diorganisasikan secara terpadu (*intergrated*) dari berbagai disiplin ilmu sosial, humaniora, dokumen Negara, terutama Pancasila, UUD 1945, GBHN, dan perundangan negara, dengan tekanan bahan pendidikan pada hubungan warga Negara dan bahan pendidikan yang berkenaan dengan bela Negara.
- b. Pendidikan Kewarganegaraan adalah seleksi dan adaptasi dari berbagai disiplin ilmu sosial, humaniora, Pancasila, UUD 1945 dan dokumen Negara lainnya yang diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah dan psikologis untuk tujuan pendidikan.
- c. Pendidikan Kewarganegaraan dikembangkan secara ilmiah dan psikologis baik untuk tingkat jurusan PMPKN FPIPS maupun dikembangkan untuk tingkat pendidikan dasar dan menengah serta perguruan tinggi.
- d. Dalam mengembangkan dan melaksanakan Pendidikan Kewarganegaraan, kita harus berpikir secara integratif, yaitu kesatuan yang utuh dari hubungan antara hubungan pengetahuan intraseptif (agama, nilai-nilai) dengan pengetahuan ektraseptif (ilmu), kebudayaan Indonesia, tujuan pendidikan nasional, Pancasila, UUD1945, GBHN, filsafat pendidikan, psikologi pendidikan, pengembangan kurikulum disiplin ilmu-ilmu sosial dan humaniora, kemudian dibuat program pendidikannya yang terdiri atas unsur: (i) tujuan pendidikan, (ii) bahan pendidikan, (iii) metode pendidikan, (iv) evaluasi.
- e. Pendidikan Kewarganegaraan menitikberatkan pada kemampuan dan ketrampilan berpikir aktif warga Negara, terutama generasi muda, dalam menginternalisasikan nilai-nilai warga Negara yang baik (*good citizen*) dalam suasana demokratis dalam berbagai masalah kemasyarakatan (*civic affairs*).
- f. Dalam kepustakaan asing Pendidikan Kewarganegaraan sering disebut *civic education*, yang salah satu batasannya ialah “seluruh kegiatan sekolah, rumah, dan masyarakat yang dapat menumbuhkan demokrasi.

Pendapat di atas menjelaskan bahwa betapa pentingnya Pendidikan Kewarganegaraan untuk siswa sebagai generasi penerus, karena Pendidikan Kewarganegaraan menggiring untuk menjadikan siswa sadar akan politik, sikap demokratis dan sebagai mata pelajaran yang wajib di belajarkan di sekolah.

Menurut Branson (1999:7) bahwa tujuan dari *civic education* atau Pendidikan Kewarganegaraan adalah :

Partisipasi yang bermutu dan bertanggung jawab dalam kehidupan politik dan masyarakat baik ditingkat lokal, Negara bagian, dan nasional. Partisipasi semacam itu memerlukan (1) Penguasaan terhadap pengetahuan dan pemahaman tertentu, (2) Pengembangan kemampuan intelektual dan partisipatoris, (3) Pengembangan karakter atau sikap mental tertentu, dan (4) Komitmen yang benar terhadap nilai dan prinsip fundamental demokrasi konstitusional Amerika.

Branson mengemukakan bahwa tujuan dari adanya Pendidikan Kewarganegaraan adalah untuk menumbuhkan sikap partisipasi warga Negara dalam kehidupan demokrasi. Sehingga warga Negara memiliki kemampuan untuk menjadi pemain atau aktor baik dalam tataran lokal maupun nasional.

Sedangkan Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan menurut Djahiri (1996:10) adalah sebagai berikut :

1. Secara umum. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan harus ajeg dan mendukung keberhasilan pencapaian Pendidikan Nasional, yaitu : “Mencerdaskan kehidupan bangsa yang mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya. Yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti yang luhur, memiliki kemampuan pengetahuann dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan”.
2. Secara khusus. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan yaitu membina moral yang diharapkan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari yaitu perilaku yang memancarkan iman dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam masyarakat yang terdiri dari berbagai golongan agama, perilaku yang bersifat kemanusiaan yang adil dan beradab, perilaku yang mendukung kerakyatan yang mengutamakan kepentingan bersama diatas kepentingan perseorangan dan golongan sehingga perbedaan pemikiran pendapat ataupun kepentingan diatasi melalui musyawarah mufakat, serta perilaku yang mendukung upaya untuk mewujudkan keadilan sosial seluruh rakyat Indonesia.

Berdasarkan tujuan Pendidikan Kewarganegaraan yang telah dikemukakan di atas, dapat diasumsikan pada hakekatnya dalam setiap tujuan membekali kemampuan-kemampuan kepada peserta didik dalam hal tanggung jawabnya sebagai warga Negara, yaitu warga Negara yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berpikir kritis, rasional dan kreatif, berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat, berbangsa dan bernegara membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa lain.

Sedangkan menurut Sapriya (2011:35), tujuan Pendidikan Kewarganegaraan adalah :

Partisipasi yang penuh nalar dan tanggung jawab dalam kehidupan politik dari warga Negara yang taat kepada nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar demokrasi konstitusional Indonesia. Partisipasi warga Negara yang efektif dan penuh tanggung jawab memerlukan penguasaan seperangkat ilmu pengetahuan dan keterampilan intelektual serta keterampilan untuk berperan serta. Partisipasi yang efektif dan bertanggung jawab itu pun ditingkatkan lebih lanjut melalui pengembangan disposisi atau watak-watak tertentu yang meningkatkan kemampuan individu berperan serta dalam proses politik dan mendukung berfungsinya sistem politik yang sehat serta perbaikan masyarakat.

Berdasarkan pendapat tersebut bahwa, Pendidikan Kewarganegaraan memiliki tujuan agar siswa memiliki pengetahuan tentang politik sebelum terjun dalam prosesnya. Untuk itu melalui Pendidikan Kewarganegaraan siswa dididik agar memahami tentang politik. Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan merupakan sebuah pembelajaran yang berusaha membina para siswa menjadi

manusia di masa depan yang akan hidup dengan nilai-nilai dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, serta mengemban misi nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Tujuan umum pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan ialah mendidik warga Negara agar menjadi warga Negara yang baik, yang dapat dilukiskan dengan “warga Negara yang patriotik, toleran, setia terhadap bangsa dan Negara, beragama, demokratis..., Pancasila sejati” Somantri, (2001:279). Fungsi dari mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan adalah sebagai wahana untuk membentuk warga Negara yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang setia kepada bangsa dan Negara Indonesia dengan merefleksikan dirinya dalam kebiasaan berpikir dan bertindak sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD 1945.

Upaya agar tujuan Pendidikan Kewarganegaraan tersebut tidak hanya bertahan sebagai slogan saja, maka harus dirinci menjadi tujuan kurikuler (Somantri, 2001:30), yang meliputi:

- a. Ilmu pengetahuan, meliputi hierarki: fakta, konsep dan generalisasi teori.
- b. Keterampilan intelektual:
 - 1) Dari keterampilan yang sederhana sampai keterampilan yang kompleks seperti mengingat, menafsirkan, mengaplikasikan, menganalisis, mensintesis, dan menilai;
 - 2) Dari penyelidikan sampai kesimpulan yang sah: (a) keterampilan bertanya dan mengetahui masalah; (b) keterampilan merumuskan hipotesis, (c) keterampilan mengumpulkan data, (d) keterampilan menafsirkan dan menganalisis data, (e) keterampilan menguji hipotesis, (f) keterampilan merumuskan generalisasi, (g) keterampilan mengkomunikasikan kesimpulan.

- c. Sikap: nilai, kepekaan dan perasaan. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan banyak mengandung soal-soal afektif, karena itu tujuan PKn yang seperti slogan harus dapat dijabarkan.
- d. Keterampilan sosial: tujuan umum Pendidikan Kewarganegaraan harus bisa dijabarkan dalam keterampilan sosial yaitu keterampilan yang memberikan kemungkinan kepada siswa untuk secara terampil dapat melakukan dan bersikap cerdas serta bersahabat dalam pergaulan kehidupan sehari-hari, Dufty (Numan Somantri, 1975:30). Mengkerangkakan tujuan PKn dalam tujuan yang sudah agak terperinci dimaksudkan agar kita memperoleh bimbingan dalam merumuskan: (a) konsep dasar, generalisasi, konsep atau topik Pendidikan Kewarganegaraan; (b) tujuan intruksional, (c) konstruksi tes beserta penilaiannya.

Djahiri (1995:10) mengemukakan bahwa melalui Pendidikan

Kewarganegaraan siswa diharapkan :

- a. Memahami dan menguasai secara nalar konsep dan norma Pancasila sebagai falsafah, dasar ideologi dan pandangan hidup Negara RI.
- b. Melek konstitusi (UUD 1945) dan hukum yang berlaku dalam negara RI.
- c. Menghayati dan meyakini tatanan dalam moral yang termuat dalam butir diatas.
- d. Mengamalkan dan membakukan hal-hal diatas sebagai sikap perilaku diri dan kehidupannya dengan penuh keyakinan dan nalar.

Berdasarkan pendapat diatas dapat penulis simpulkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan sebagai program pengajaran tidak hanya menampilkan sosok program dan pola KBM yang hanya mengacu pada aspek kognitif saja, melainkan secara utuh dan menyeluruh yakni mencakup aspek afektif dan psikomotor. Selain aspek-aspek tersebut Pendidikan Kewarganegaraan juga mengembangkan pendidikan nilai.

Sebagaimana lazimnya suatu bidang studi yang diajarkan di sekolah, materi Pendidikan Kewarganegaraan menurut Branson (1999:4) harus mencakup tiga komponen, yaitu *Civic Knowledge* (pengetahuan kewarganegaraan), *Civic Skills* (keterampilan kewarganegaraan), dan *Civic Disposition* (watak-watak kewarganegaraan). Komponen pertama, *Civic Knowledge* berkaitan dengan kandungan atau nilai apa yang seharusnya diketahui oleh warganegara. Aspek ini menyangkut kemampuan akademik-keilmuan yang dikembangkan dari berbagai teori atau konsep politik, hukum dan moral. Dengan demikian, mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan merupakan bidang kajian multidisipliner. Secara lebih terperinci, materi pengetahuan kewarganegaraan meliputi pengetahuan tentang hak dan tanggung jawab warga Negara, hak asasi manusia, prinsip-prinsip dan proses demokrasi, lembaga pemerintah dan nonpemerintah, identitas nasional, pemerintahan berdasar hukum (*rule of law*) dan peradilan yang bebas dan tidak memihak, konstitusi, serta nilai-nilai dan norma dalam masyarakat.

Komponen kedua, *civic education* dalam masyarakat demokratis adalah *civic skills*. Jika warganegara mempraktekan hak-haknya dan menunaikan tanggung jawabnya sebagai anggota masyarakat yang berdaulat, mereka tidak hanya perlu menguasai pengetahuan induk sebagaimana diwujudkan dalam lima pertanyaan

yang barusaja diuraikan tadi, namun merekapun perlu memiliki kecakapan-kecakapan intelektual dan partisipatoris yang relevan.

Komponen mendasar ketiga dari *civic education* adalah watak-watak kewarganegaraan (*civic disposition*) yang mengisyaratkan pada karakter publik maupun privat yang penting dari pemeliharaan dan pengembangan demokrasi konstitusional. Watak-watak kewarganegaraan sebagaimana kecakapan kewarganegaraan, berkembang secara berlahan sebagai akibat dari apa yang telah dipelajari dan dialami oleh seseorang dirumah, sekolah, komunitas, dan organisasi-organisasi *civil society*. Pengalaman-pengalaman demikian hendaknya membangkitkan pemahaman bahwasanya demokrasi mensyaratkan adanya pemerintahan mandiri yang bertanggung jawab dari tiap individu.

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa di dalam Pendidikan Kewarganegaraan terdapat pendidikan politik yang masuk dalam Pendidikan Kewarganegaraan yang sebagaimana Pendidikan Kewarganegaraan masuk dalam kurikulum sekolah.

C. Pendidikan Politik di Sekolah

Sekolah mempunyai peranan yang sangat penting dalam sosialisasi politik terutama sebagai Agen Sosialisasi Politik dan Pendidikan Politik, karena sekolah merupakan tempat dimana generasi penerus bangsa yang sangat potensial untuk kemajuan suatu bangsa di

masa akan datang, sehingga diperlukan sejak dini untuk mengenalkan konsep-konsep kenegaraan dan politik guna terciptanya ketahanan nasional dan perilaku politik yang santun dan bermoral.

Sekolah secara umum merupakan wahana bagi pengembangan kepribadian siswa dalam mengenal konsep-konsep tentang ketertarikan politik, masyarakat sipil dan partisipasi politik, dimana siswa belajar tentang bagaimana masyarakat melakukan pemilihan umum, pemahaman tentang ketertarikan masyarakat dalam berpolitik praktis dan bagaimana juga memahami masyarakat madani secara komprehensif dan dengan demikian diharapkan akan menambah rasa cinta terhadap tanah air dan bangsa.

Dalam kegiatan sosialisasi politik dikenal yang namanya agen sosialisasi politik. Agen inilah yang melakukan kegiatan memberi pengaruh kepada individu. Rush dan Althoff (2005:9) menggariskan terdapatnya 5 agen sosialisasi politik yang umum diketahui, yaitu :

1. Keluarga
2. Sekolah
3. Peer groups
4. Media massa
5. Pemerintah
6. Partai politik

Ramlan Surbakti dalam memberikan pengertian tentang pendidikan politik harus dijelaskan terlebih dahulu mengenai sosialisasi politik. Surbakti (1999:117) berpendapat bahwa :

Sosialisasi politik dibagi dua yaitu pendidikan politik dan indoktrinasi politik. Pendidikan politik merupakan suatu proses dialogik diantara pemberi dan penerima pesan. Melalui proses ini,

para anggota masyarakat mengenal dan mempelajari nilai-nilai, norma-norma, dan simbol-simbol politik negaranya dari berbagai pihak dalam sistem politik seperti sekolah, pemerintah, dan partai politik.

Hal ini menunjukan bahwa sosialisasi politik terjadi bukan hanya di masyarakat tetapi juga di lingkungan sekolah. Dalam menjalankan dan mengoptimalkan proses sosialisasi politik maka perlu strategi dan tempat yang tepat di mana sosialisasi politik itu dilaksanakan, salah satu contoh bahwa sebagai salah satu sarana atau agen tempat sosialisasi politik itu adalah di lingkungan sekolah. Sekolah merupakan suatu wahan yang luas untuk sosialisasi politik, tetapi lebih mengarah terhadap pendidikan politik yang bertujuan agar anak didiknya (siswa) menjadi insan yang melek politik (sadar politik). Sosialisasi politik terkait dengan konsep dimana individu-individu dapat memperoleh pengetahuan, sikap dan nilai-nilai tentang sistem politik masyarakat, umumnya Negara.

★ Sekolah sebagai lembaga pendidikan politik formal, karena pendidikan politik di sekolah diperoleh dengan adanya Pendidikan Kewarganegaraan pada pembelajaran formal di kelas melalui teori-teori yang diajarkan oleh guru dan praktek secara langsung ataupun secara tidak langsung, melalui upacara bendera dan organisasi-organisasi yang ada di sekolah. Sekolah memainkan peran sebagai agen sosialisasi politik melalui kurikulum pengajaran formal, beraneka ragam kegiatan sekolah dan kegiatan-kegiatan guru.

Pendidikan Politik atau media sosialisasi politik yang dilakukan di sekolah meliputi :

a. Melalui Kegiatan Sekolah

1. OSIS (Organisasi Siswa Intra Sekolah)

Didalam kegiatan OSIS banyak sekali yang menjurus pada kegiatan politik seperti dalam bermusyawarah didalam anggota, cara menyampaikan pendapat kepada orang lain, kegiatan upacara bendera dan bakti sosial dan semua kegiatan yang dilakukan oleh OSIS. Seperti pada pemilihan pengurus osis dalam suatu sekolahpun cara bersosialisasinya merupakan kegiatan politik

2. Pramuka

Pramuka merupakan suatu wadah pembina dan pengembangan para remaja baik yang ada di lingkungan sekolah maupun non sekolah. Pramuka membina dan mengembangkan sikap prilaku remaja lebih sesuai pada pengembangan sikap prilaku umum yang terdapat dalam masyarakat.

Gerakan Pramuka menyelenggarakan pendidikan dengan menggunakan prinsip dasar dan metodik pendidikan kepramukaan, yang diantaranya menekankan pada bentuk permainan/kegiatan yang menarik dan mengandung pendidikan. Melalui pendekatan tersebut diharapkan

pendidikan kepramukaan mampu lebih mendorong internalisasi dan sosialisasi anggota Gerakan Pramuka sehingga memiliki sikap politik (kewarganegaraan) sesuai dengan tujuan Gerakan Pramuka. Sikap politik yang dimaksud meliputi aspek-aspek kesadaran akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara, rasa nasionalisme dan patriotisme serta mendukung sistem kehidupan nasional yang demokrasi sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

Kegiatan kepramukaan telah dirancang guna pencapaian tujuan pendidikan kepramukaan, yaitu dalam rangka mengembangkan rasa cinta tanah air serta sikap patriotisme, maka tidak diragukan lagi sumbangannya terhadap pengembangan kesadaran kehidupan berbangsa dan bernegara Pramuka. Atau dengan ungkapan yang lain yaitu pendidikan kepramukaan memiliki peranan langsung maupun tidak langsung dalam pendidikan politik bagi generasi muda Muhammad Husni dalam(<http://panduhusnibravo.blogspot.com/2012/03/pendidikan-politik-dalam-gerakan.html>)

b. Mata Pelajaran

Pendidikan Kewarganegaraan adalah mata pelajaran yang digunakan sebagai wahana untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral yang berlaku pada budaya bangsa Indonesia yang diharapkan dapat diwujudkan dalam

kehidupan sehari-hari siswa, seperti yang di kemukakan oleh Somantri (2001:154) mengemukakan bahwa:

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan usaha untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan dan kemampuan dasar yang berkenaan dengan hubungan antar warga Negara dengan Negara serta pendidikan pendahuluan bela Negara agar menjadi warga Negara agar dapat diandalkan oleh bangsa dan Negara.

Dapat diketahui bahwa didalam Pendidikan Kewarganegaraan siswa mempelajari tentang kewarganegaraan, Negara sistem demokrasi, bela Negara dan semua itu akan berhubungan dengan politik.

Pendidikan Kewarganegaraan melalui kurikulumnya memberikan pandangan-pandangan yang kongkrit tentang lembaga-lembaga politik dan hubungan-hubungan politik. Ia juga dapat memegang peran penting dalam pembentukan sikap terhadap aturan permainan politik yang tak tertulis. Pendidikan Kewarganegaraan pun dapat mempertebal kesetiaan terhadap sistem politik dan memberikan symbol-simbol umum untuk menunjukkan tanggapan yang ekspresif terhadap system tersebut.

c. Media masa

Bentuk pendidikan politik menurut Rusadi Kantaprawira (2004: 56) dapat diselenggarakan antara lain melalui:

- a. Bahan bacaan seperti surat kabar, majalah, dan lain-lain bentuk publikasi massa yang biasa membentuk pendapat umum.
- b. Siaran radio dan televisi serta film (audio visual media)

- c. Lembaga atau asosiasi dalam masyarakat seperti masjid atau gereja tempat menyampaikan khotbah, dan juga lembaga pendidikan formal (sekolah) ataupun informal.

Melalui media masa seperti media cetak atau elektronik seperti televisi, majalah, surat kabar, radio yang biasanya berada di perpustakaan dapat memuat masalah-masalah social politik, ekonomi, bisnis, budaya serta masalah lingkungan hidup dan sebagainya dan sebagaimana yang actual dan factual. Dengan adanya media masa ini para siswa dapat membaca dan melihat memahami berbagai ilmu.

